

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam keseharian hidup manusia di dunia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara informal maupun formal. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam pembangunan *human capital* yang merupakan pendorong utama sumber daya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, sehingga pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Gagasan investasi memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi individu, masyarakat luas maupun bagi negara. Hal ini senada dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Dalam rangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas.

¹Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung:Citra Umbara, 2003) hlm. 7.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah (desentralisasi) yang ditempuh oleh pemerintah daerah akan meningkatkan, termasuk dalam penganggaran pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Melalui desentralisasi pengelolaan pendidikan akan dapat menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pendidikan yang sentralistik. Sekolah akan mampu secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk memajukan sistem pendidikannya dengan menggali, memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai potensi sumber daya yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan sangat dominan dalam sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan juga menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Masalah keuangan sekolah juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan politik yang sedang berkembang di masyarakat, demikian halnya masalah evaluasi keuangan sekolah tidak terlepas dari masalah politik. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi Kepala Sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan (pengelolaan keuangan), evaluasi dan pertanggungjawabannya. Disamping itu kepala sekolah juga harus memahami konteks politik dan ekonomi serta implikasinya terhadap keuangan sekolah.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, dimasa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*financial* atau *non financial*).

E. Mulyasa berpendapat masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.²

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.³

Manajemen keuangan sekolah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing

²E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-5, hlm. 193-194.

³E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-5, hlm. 194

sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah diamanatkan negara yaitu sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang terdapat pada BAB II Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan, Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2 :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.⁴

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak, merupakan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama secara umum dan hingga saat ini keberadaannya sangat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan dunia pendidikan di tanah air ini. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikannya objek penelitian yang terfokus kepada pelaksanaan manajemen keuangan. Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berjudul, *Pelaksanaan Manajemen Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak*.

⁴Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung:Citra Umbara, 2003) hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak?
3. Bagaimanakah evaluasi keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari karya penelitian ini antara lain

- a. Untuk mengetahui perencanaan keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak.
- c. Untuk mengetahui evaluasi keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau rujukan tentang manajemen keuangan di lembaga pendidikan.
- 2) Sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan tentang pelaksanaan dan problematika di bidang manajemen keuangan.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jungpasir Wedung Demak fokus perhatian studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk

megambil lagkah-langkah guna meningkatkan pelaksanaan manajemen keuangan sekolah, mengingat sejauh ini persoalan pelaksanaan manajemen keuangan sekolah yang umumnya masih ada perbaikan-perbaikan lagi.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga pendidikan Islam tentang pelaksanaan manajemen keuangan.